

DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi
Good Governance

Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.

Pengantar:

Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan-Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi
Good Governance

**Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.**



DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Katalis Untuk Integrasi dan Optimalisasi Good Governance

Penulis:

**Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si.
Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.**

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.**
Tata Letak : **Lilis Khalisatul Karimah, S.H.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 129**
ISBN : **978-623-8385-57-7**
Terbit Pada : **April 2024**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Prov. Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR



Kitab di tangan anda adalah buku hari ini dan di masa depan. Digitalisasi pemerintahan daerah adalah jawaban atas problem pelayanan pemerintahan di level bawah. Kita tak mungkin lari menghindari loncatan revolusi teknologi yang kian menyentuh semua aspek kehidupan. Kita tak mungkin hanya menyaksikan, justru dengan terpaksa turut mengambil bagian. Dan untuk terlibat di tubir layanan digital itu, kita tentu saja butuh buku ini sebagai panduan merancang digitalisasi pemerintahan di masa depan.

Dalam konteks itu digitalisasi pemerintahan menjadi perhatian serius. Keseriusan itu setidaknya didorong oleh pertama, tekanan global yang menerpa di hampir semua strata pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Kedua, evolusi pelayanan pemerintahan baik di level paradigma, maupun teknis layanan. Ketiga, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelayanan itu sendiri. Ketiga hal itu menjadi alasan kuat mengapa digitalisasi pemerintahan, khususnya di daerah penting ditelaah lebih jauh.

Perubahan paradigma layanan publik melalui prinsip-prinsip *good governance* hanya mungkin direalisasikan lewat digitalisasi di lingkungan pemerintahan. Transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepastian hukum dapat diwujudkan apabila tersedia infrastruktur teknologi yang dapat dioperasikan langsung. Tanpa semua itu, prinsip-prinsip pelayanan yang baik tetap saja menjadi konsep dan teori kosong.

Paradigma pemerintahan kini tampak ikut melaju. Namun realitas kita masih saja di bagian terbelakang. Merangkak pelan

dengan berbagai teknologi sebagai alat untuk mempermudah. Salah satunya lewat digitalisasi pemerintahan. Pengaruh pergeseran paradigma dari apa yang disebut revolusi industri oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad 19 telah sampai pada ujungnya, revolusi industri 4.0 hingga 5.0.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip *agile governance*, dibutuhkan banyak faktor sebagai upaya menciptakan lingkungan kondusif. Salah satunya penyiapan regulasi sebagai landasan pijak. Pada tahap berikutnya bagaimana merancang organisasi yang dapat mewadahi semua perubahan dimaksud. Upaya ini setidaknya dapat menjadi bagian penting dalam mempertanggungjawabkan berbagai layanan berbasis transaksi elektronik dimana dan kapan saja. Dengan begitu tindakan para administrator tak hanya memenuhi aspek materil, juga terlindungi secara formil. Bukunya ini mengingatkan kita pada bagian kedua.

Pada tingkat implementasi, digitalisasi pemerintahan membutuhkan *roadmap* sebagai dasar perencanaan makro, meso dan mikro guna mencapai tujuan ideal. Peta jalan digunakan sebagai alat pandu mencapai target jangka panjang, menengah dan pendek. Dalam hal ini peta jalan harus dapat memberi batas horison terkait kewenangan pusat dan daerah sebagai subjek dan objek dalam praktek digitalisasi pemerintahan. Dengan kewenangan, pemerintah dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan tepat waktu.

Kewenangan memberi kesempatan untuk mendesain organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Sebab sebaik apapun model pelayanan sebagai produk manusia, Ia hanya mungkin direalisasikan dalam ruang pemerintahan apabila setiap entitas memiliki kewenangan yang cukup. Kewenangan itu setidaknya memungkinkan bagi setiap entitas pemerintah melakukan berbagai hal sesuai porsi dan kebutuhan.

Pada tahap selanjutnya pemerintah dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga proyek digitalisasi pemerintahan tak sia-sia. Organisasi masyarakat kompetensi sumber daya manusia yang ketat. Dalam hal ini kapasitas aparatur perlu di upgrade selain integrasi data dan keamanan nasional. Pelaksanaan digitalisasi pemerintahan

setidaknya menguatkan fungsi hakikinya sebagai pelayan, serta menempatkan masyarakat selaku pengambil manfaat akhir.

Ide penyederhanaan pelayanan publik kini menjadi harapan setiap pemerintahan. Dalam konteks itu bagaimana tata kelola pelayanan publik dilakukan sehingga diperoleh kepuasan. Tata kelola tak hanya dimaksudkan meraih tujuan efektif dan efisien, juga menjamin kepastian hukum. Selain itu tata kelola perlu dilakukan mengingat dinamika dalam ekologi pemerintahan. Untuk maksud itu tata kelola perlu dilakukan melalui perubahan manajemen dari level tertinggi hingga rendah. Dalam makna luas meliputi struktur, kultur, dan prosedur.

Harus diakui, buku ini tak sekedar memperlihatkan motivasi soal mengapa digitalisasi pemerintahan terutama di daerah urgensi dibutuhkan, landasan konseptual teoritik, serta bagaimana pelaksanaan tata kelola di level terbawah, juga contoh-contoh konkrit sebagai hasil studi empirik yang dapat langsung di uji-petik oleh mereka yang berkepentingan dengan isu ini. Buku ini tak hanya menawarkan konsep, juga mendorong kita berangkat ke aplikasi sesungguhnya.

Tentu saja bagian ini menurut saya sangat bermanfaat dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi pemerintahan tanpa dipaksa menyalin mentah-mentah, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sebuah aplikasi teknologi boleh saja memberikan keuntungan di level tertentu, namun boleh jadi tidak untuk daerah lain. Ia seringkali membutuhkan waktu, pendekatan, keramahan, sekaligus pola tertentu agar adaptif.

Hasil-hasil analisis dari praktek perbandingan tersebut kiranya dapat menjadi masukan guna merancang langkah maju di masa depan. Langkah tersebut tidak hanya seperangkat kebijakan yang dilakukan sesegera mungkin, juga kecenderungan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan bagi pengembangan digitalisasi pemerintahan. Dengan demikian, apa yang menjadi maksud dan tujuan digitalisasi pemerintahan di daerah tak hanya dapat diterima, juga memberi faedah bagi kemaslahatan manusia.

Akhirnya, saya patut mengapresiasi penulisan buku ini, yang tidak saja padat, juga runtut sebanyak tujuh bab. Bab-bab itu

diperjelas lewat pembahasan pada sub-sub bab. Di luar kelemahan buku ini yang mungkin dapat anda temukan secara tak sengaja, saya mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Dr. Hary Mulya dan Sdri. Sisca Septiani, yang telah melengkapi literatur di rak buku pemerintahan, khususnya digitalisasi pemerintahan di daerah.

Jakarta, 4 Maret 2024

Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si.

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Buku berjudul "**Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis untuk Integrasi dan Optimalisasi *Good Governance***" merupakan hasil dari perenungan panjang dan penelitian mendalam tentang bagaimana digitalisasi dapat menjadi kunci dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Digitalisasi pemerintahan bukan hanya sebuah tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak di era modern ini. Dalam buku ini, penulis berusaha menyajikan konsep digitalisasi dalam berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai dari konteks dan evolusi pelayanan publik di era digital, peran teknologi informasi, hingga tantangan dan peluang yang ada. Selanjutnya, buku ini juga mendalami landasan teori dan konseptual *good governance* dalam kaitannya dengan digitalisasi, strategi implementasi, peningkatan layanan publik, tata kelola dan manajemen perubahan, hingga analisis kasus dan langkah kedepan untuk masa depan digitalisasi di pemerintahan daerah.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini. Kepada para ahli dan praktisi di bidang digitalisasi pemerintahan yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, para rekan-rekan kerja yang telah memberikan *insight* berharga, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi.

Harapan penulis, buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, akademisi, praktisi, dan siapapun yang berkepentingan dalam mengimplementasikan dan mengoptimalkan digitalisasi untuk mencapai *good governance* di pemerintahan daerah. Mari kita bersama-sama membangun masa

depan digital di pemerintahan daerah yang lebih integratif, optimis, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Jakarta, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH	1
A. Konteks Digitalisasi dalam Pemerintahan	1
B. Evolusi Pelayanan Publik Menuju Era Digital	4
C. Peran Teknologi Informasi di Pemerintahan Daerah.....	6
D. Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi.....	9
E. <i>Good Governance</i> sebagai Tujuan Utama	11
F. Kerangka Kerja untuk Digitalisasi di Pemerintahan Daerah ..	13
G. Studi Kasus Sukses Digitalisasi di Berbagai Daerah.....	15
BAB 2 LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Definisi dan Dimensi <i>Good governance</i>	19
B. Prinsip Dasar Digitalisasi Pemerintahan.....	21
C. Teknologi sebagai <i>Enabler Good governance</i>	23
D. Model Integrasi Layanan Publik Digital	24
E. Kerangka Regulasi untuk Digitalisasi.....	26
F. Teori Perubahan Organisasi dalam Konteks Pemerintahan Daerah	27
G. Evaluasi Kesiapan Digital pada Pemerintahan Daerah.....	29
BAB 3 STRATEGI IMPLEMENTASI DIGITALISASI	32
A. Perencanaan Strategis dan <i>Roadmap</i> Digital.....	32
B. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	34
C. Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan	36
D. Pengelolaan Data dan Keamanan Informasi	38
E. Integrasi Sistem Layanan Publik	39
F. Partisipasi Masyarakat dalam Digitalisasi	41
G. Model Pendanaan untuk Proyek Digital.....	42
H. Monitoring dan Evaluasi Implementasi	45
BAB 4 DIGITALISASI UNTUK PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK	48
A. <i>E-government</i> dan Layanan Administrasi Online	48

B.	Sistem Informasi Geografis untuk Pelayanan Publik.....	50
C.	Digitalisasi di Sektor Kesehatan dan Pendidikan	53
D.	Inovasi Layanan Keuangan Daerah	55
E.	Platform Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat.....	56
F.	Manajemen Bencana Berbasis Digital	57
G.	Layanan Publik Ramah Disabilitas	58
H.	Kasus <i>Best Practice</i> Layanan Publik Digital.....	60
BAB 5 TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PERUBAHAN.....		63
A.	Kepemimpinan dalam Era Digital	63
B.	Budaya Organisasi yang Mendukung Digitalisasi.....	65
C.	Manajemen Perubahan untuk Digitalisasi	67
D.	Stakeholder <i>Engagement</i> dalam Proses Digitalisasi	68
E.	Manajemen Risiko dan Mitigasi	70
F.	Etika dan Hukum dalam Digitalisasi.....	72
G.	Pembangunan Kapasitas dan Pelatihan	73
H.	Strategi Komunikasi dalam Transformasi Digital	75
BAB 6 ANALISIS KASUS: STUDI KOMPARATIF		78
A.	Kasus Sukses Digitalisasi di Pemerintahan Daerah Bandung	78
B.	Kasus Sukses Digitalisasi di Pemerintahan Daerah DKI Jakarta	80
C.	Analisis Kegagalan dan Pelajaran yang Dipetik.....	82
D.	Digitalisasi dan Dampaknya pada <i>Good governance</i>	83
E.	Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	86
F.	Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Digitalisasi.....	88
G.	Perbandingan Model Digitalisasi Internasional	89
H.	Adaptasi Strategi Digital Berdasarkan Konteks Lokal	91
I.	Rekomendasi untuk Implementasi di Indonesia	93
BAB 7 LANGKAH KE DEPAN DIGITALISASI		95
A.	Implikasi untuk Praktik <i>Good Governance</i>	95
B.	Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Daerah.....	97
C.	Tantangan Utama dan Solusi Potensial	99
D.	Inisiatif Berkelanjutan untuk Digitalisasi.....	101
E.	Prediksi Tren Digitalisasi Masa Depan	103
F.	Arah Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi	109
G.	Membangun Masa Depan Digital di Pemerintahan Daerah..	111

EPILOG	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
GLOSARIUM	123
INDEKS.....	125
BIOGRAFI PENULIS.....	128

BAB 1

DIGITALISASI

PEMERINTAHAN DAERAH

A. Konteks Digitalisasi dalam Pemerintahan

Digitalisasi dalam konteks pemerintahan merupakan sebuah transformasi yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Studi oleh Panggabean & Meilani (2023) menyoroti bagaimana digitalisasi pelayanan publik telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Pangandaheng et al. (2022) menekankan perlunya menciptakan nilai publik dalam transformasi digital pemerintahan untuk memperkuat ekonomi, administrasi, dan demokrasi.

Implementasi digitalisasi juga memerlukan kesiapan dan peningkatan pengetahuan, seperti yang disoroti oleh Hasanuddin et al. (2022) dalam konteks kesiapan digitalisasi sekolah. Selain itu, Nursin et al. (2023) menyoroti pentingnya penerapan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, strategi digitalisasi ekonomi kerakyatan juga menjadi fokus, seperti yang dibahas oleh (Mandira & Kusuma, 2022). Mereka menyoroti pentingnya menganalisis kebijakan dan strategi digitalisasi untuk mempersiapkan ekonomi kerakyatan menghadapi era digitalisasi. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi juga berperan dalam pembangunan infrastruktur, seperti dalam agenda pembangunan PLTN (Hariyadi, 2017). Studi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi pemerintahan, tetapi juga pada sektor pembangunan infrastruktur yang vital. Dengan demikian,

pemerintah dari mana saja dan kapan saja, mengurangi kebutuhan untuk kunjungan fisik ke kantor pemerintahan yang seringkali memakan waktu dan sumber daya. Hal ini secara signifikan meningkatkan kemudahan akses bagi warga negara, termasuk kelompok marginal yang sebelumnya mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah. Lebih jauh, digitalisasi memungkinkan integrasi layanan lintas sektor dan lembaga, menciptakan sebuah ekosistem pelayanan publik yang terpadu. Dengan memanfaatkan basis data terpusat dan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih koheren dan terkoordinasi, menghindari duplikasi kerja dan meminimalisir birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, digitalisasi juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan memudahkan akses informasi publik, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Ini mendorong pemerintah untuk bekerja lebih bertanggung jawab dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Pada proses digitalisasi, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci. Pemerintah dapat memanfaatkan platform digital untuk menggalang masukan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat tetapi juga memperkuat legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. tetapi, tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik juga tidak dapat diabaikan. Isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama, memerlukan pengelolaan dan perlindungan data yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi warga negara. Selain itu, kesenjangan digital antara berbagai kelompok masyarakat juga perlu diatasi, memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan digital.

Pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya yang cukup dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam pelatihan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang TI. Kebijakan publik yang mendukung inisiatif digitalisasi, termasuk regulasi yang memfasilitasi inovasi

digital dan kerjasama dengan sektor swasta, juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan transformasi digital di sektor publik.

Kesuksesan digitalisasi pelayanan publik juga tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan berbasis pengguna, memastikan bahwa desain dan implementasi layanan digital benar-benar memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Ini berarti memahami pengalaman pengguna dan secara terus-menerus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan digital.

Digitalisasi pelayanan publik harus dianggap sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian reguler. Teknologi terus berkembang, dan demikian pula harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pemerintah perlu terus menerapkan pembelajaran dan adaptasi dalam strategi digitalisasinya, memastikan bahwa layanan publik tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebut.

C. Peran Teknologi Informasi di Pemerintahan Daerah

Pada era globalisasi dan revolusi digital saat ini, Teknologi Informasi (TI) telah menjadi katalis utama dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan daerah. Keberadaan dan penggunaan TI dalam berbagai aspek pelayanan publik menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh nyata dari implementasi TI dapat dilihat melalui pengembangan aplikasi online untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Lebih dari itu, TI juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui publikasi informasi secara online dan sistem pengaduan masyarakat yang memudahkan dialog antara warga dan pemerintah.

Teknologi Informasi (TI) telah terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah. Pengotomatisasian proses manual yang memakan waktu dan sumber daya, seperti *e-office*, *e-*

budgeting, dan *e-procurement*, mengurangi beban kerja dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih strategis. Sistem komunikasi internal dan platform kolaborasi online telah mengubah cara instansi pemerintah berkoordinasi dan berkomunikasi, memecahkan silo operasional yang sebelumnya menghambat sinergi antar-departemen.

Peran TI dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan forum online, *e-musyawah*, dan *e-voting*, masyarakat diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan perumusan program pembangunan. Ini, bersama dengan peningkatan akses informasi publik dan transparansi pemerintahan melalui website resmi dan media sosial, memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan inklusif. Dalam konteks peningkatan daya saing daerah, TI menyediakan platform yang efektif untuk mempromosikan potensi daerah kepada investor dan wisatawan. Dari website pariwisata hingga aplikasi mobile untuk wisatawan dan *platform e-commerce* untuk produk lokal, TI membuka pintu bagi daerah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan reputasi dan daya tarik daerah di mata dunia.

Beberapa contoh penerapan TI yang telah dilaksanakan di berbagai pemerintahan daerah mencakup sistem *e-government* yang mengotomatisasi proses administrasi pemerintah, *e-planning* untuk perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, dan *e-budgeting* untuk pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Sistem *e-procurement* memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara yang akuntabel, sementara *e-learning* dan sistem informasi publik secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Namun, transisi menuju pemerintahan daerah yang didigitalisasi tidak tanpa tantangan. Keterbatasan infrastruktur TI di beberapa daerah, kurangnya keterampilan dan pengetahuan TI di kalangan aparatur pemerintah, kebutuhan akan pendanaan yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TI, serta kebutuhan akan sistem keamanan siber yang kuat merupakan beberapa

Dengan demikian, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efektif untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih strategis.

Kekhawatiran timbul bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat, manusia dapat tergeser atau tergantikan oleh mesin atau sistem otomatis. Meskipun demikian, peran manusia dalam pemerintahan daerah tetap penting dalam mengelola dan mengawasi implementasi teknologi informasi. Manusia masih diperlukan dalam membuat keputusan strategis, menafsirkan data, dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan yang seimbang antara teknologi dan manusia harus diambil. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan TI di kalangan pegawai pemerintah, sehingga mereka dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara etis dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan pendekatan yang berfokus pada inklusi, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak.

D. Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi

Digitalisasi telah menjadi kata kunci dalam era modern, menjanjikan transformasi besar dalam cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Namun, perjalanan menuju digitalisasi penuh bukanlah tanpa rintangan. Tantangan yang muncul seringkali kompleks, mencakup aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Di sisi lain, peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik adalah signifikan, memberikan motivasi kuat untuk mengatasi hambatan yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Definisi dan Dimensi *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola yang baik dalam suatu negara atau organisasi. Hal ini mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* juga merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997, *good governance* dipahami sebagai cara bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi guna mendukung pembangunan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh World Bank pada tahun 1992. Joseph Stiglitz, seorang ekonom ternama, pada tahun 2002 menyatakan bahwa *good governance* seharusnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan demikian, pandangan ahli dari berbagai lembaga dan disiplin ilmu menekankan pentingnya *good governance* dalam memastikan pemerintahan yang efektif, adil, dan berorientasi pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola yang baik mengacu pada pelaksanaan tanggung jawab yang efektif, transparan, dan akuntabel baik di sektor publik maupun swasta. Ini melibatkan keberadaan lembaga yang efisien dan

EPILOG

Buku Mas Harry dan Sisca, Digitalisasi Pemerintahan Daerah

Oleh: Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si.

Sebulan lalu, Dr. Harry Mulya Zein mengirimkan potongan judul dan daftar isi buku bertajuk Digitalisasi Pemerintahan Daerah. Ia dosen tetap IPDN yang pernah malang-melintang di Pemda dan Komisi ASN. Beliau menuntut saya memberikan kata pengantar pendek dalam waktu sekejap.

Saya menawar testimoni, menimbang draft tak terkirim utuh sebagaimana buku yang pernah saya beri pengantar. Beliau tak bergeming, tetap minta kata pengantar. Saya mengalah, mencoba mengabstraksi bab dan subbab dengan menghubungkan satu sama lain seperti membangun Jembatan Indiana Jones antara Depok-Jakarta di Sungai Ciliwung.

Buku Mas Harry dan Sisca tak hanya menawarkan konsep teoritis sebagai landas pikir, juga manajemen dan strategi teknis yang diambil dari sana-sini, termasuk komparasi praktikal di sejumlah daerah. Buku semacam itu tentu jarang, apalagi ditulis dalam bingkai pemerintah daerah sebagai fokus dan lokus penceritaan. Upaya itu patut diapresiasi agar landing di bumi, bukan di awang-awang.

Tentu saja buku itu disiapkan olehnya agar menukik tajam di daerah. Agar sampai, Ia butuh sitasi pembaca yang tau manfaat digitalisasi di ranah itu. Maklum, terlalu banyak institusi pendidikan menjadikan isu digitalisasi, namun alih-alih melahirkan produk konkrit untuk diterapkan, konsep digitalisasi pemerintahan pun kadang terasa kabur.

Kita sadar betul bahwa generasi x adalah kelompok imigran digital. Mas Harry tentu bagian dari itu. Uniknya, Ia malah mengkhawatirkan implikasi atas ketidaksiapan Pemda menerima konsekuensi. Mungkin itu alasan mengapa Ia menulis Digitalisasi Pemda, yang saya sendiri pun kurang yakin soal penguasaan digital penulis, apalagi berselancar di media sosial yang sesak oleh penetrasi influencer & buzzer.

Buku ringan itu tentu saja mudah dibaca. Boleh dibilang hanya ringkasan, atau semacam *executive summary* yang memudahkan praja menyelesaikan bacaannya. Saya tak yakin bisa dijadikan bantal tidur di Kelas Majapahit atau Kasepuhan, menimbang tipisnya buku itu. Mas Harry sengaja agar praja tak terbebani.

Membaca buku bagi praja tentu perilaku langka. Jangankan diminta membeli, dikasih percuma pun belum tentu dibaca. Angka literasi kita memang di bawah standar. Rangkaing 60 dari 61 negara (WMLT, 2016). Rupanya, upaya membebaskan pengetahuan pada Mbah Gugel tak hanya melanda siswa, juga guru dan dosen. Otak kita mulai jarang digunakan, kecuali menghamba pada gadget.

Tuna literasi membuat pengetahuan kita terpotong-potong. Parahnya, limbah hoax meluap ketimbang esensi ilmu pengetahuan. Atas nama efisiensi dan efektivitas, digitalisasi tak luput dari pelemahan di daerah. Di luar nilai positifnya, digitalisasi pun membuka peluang pengangguran, manipulasi, kecurangan, fiktif, bahkan tipu daya.

Praktek itu tak perlu dicari jauh-jauh. Aplikasi layanan presensi kantor bisa dimanipulasi, angka nominal anggaran dapat disesuaikan, rekapitulasi kinerja dapat dikunci agar selaras antara input dan output. Algoritma diakui buatan manusia. Sama halnya digitalisasi di daerah. Ia bergantung pada admin, *the man behind the gun*.

Terlepas dari itu, buku Mas Harry ibarat lentera kecil yang membimbing praja memasuki eranya sebagai gen z. Tantangan itu butuh keterampilan super inovasi, agar problem di daerah cepat diatasi. Kendatipun buku ini tak sepenuhnya menjelaskan panjang kali lebar, namun Harry telah mengambil prakarsa untuk menambah literatur pemerintahan.

Ini *applied theory* dari teknologi pemerintahan sebagaimana pohon ilmu kybernologi Talizi. Digitalisasi pemerintahan menunjukkan pada kita bagaimana layanan dipuaskan lewat jari-jemari, dari maya ke realitas empirik, dari garis horison ke pelupuk mata, dari waktu lama ke sebentar, bahkan dari pembebanan ke pembebasan. Demikianlah cara praktis teknologi berkontribusi di dunia pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy W., dan Johannes F. Linn. "Urban Public Finance in Developing Countries." Oxford University Press, 1992.
- Bird, Richard M., dan Michael J. Smart. "Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries." *World Development*, vol. 30, no. 6, 2002, hlm. 899–912.
- Boadway, Robin, dan Anwar Shah. "Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance." Cambridge University Press, 2009.
- Charles, P., Oman., Christiane, Arndt. (2006). Governance Indicators for Development. doi: 10.1787/244762742121
- Deloitte. (n.d.). *Blockchain for the Public Sector*. <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/understanding-basics-of-blockchain-in-government.html>
- European Journal of ePractice. (n.d.). Government Digital Transformation: The Role of Technology in the Evolution of Public Sector. <https://www.epractice.eu/en/documents>
- Gil-Garcia, J.R., Pardo, T.A., & Nam, T. (2015). What Makes a City Smart? Identifying Core Components and Proposing an Integrative and Comprehensive Conceptualization. *Information Polity*, 20(1), 61-87. <https://doi.org/10.3233/IP-150354>
- Hasanuddin, H., Puryadi, P., & Jayadi, A. (2022). Analisis kesiapan digitalisasi sekolah jenjang smp di kabupaten sumbawa barat. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1855>
- Heeks, R. (2017). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge. <https://www.routledge.com/Information-and-Communication-Technology-for-Development-ICT4D/Heeks/p/book/9781138101814>
- IBM. (n.d.). *Blockchain for Government*.

<https://www.ibm.com/blockchain/industries/government>

- Kotter, J.P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business School Press. Ini adalah sumber kunci tentang teori dan praktek perubahan organisasi.
- Mandal, C. and Gupta, A. (2015). *Dimensions of good governance.*, 176-190. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8274-0.ch009>
- Mandira, I. and Kusuma, P. (2022). Strategi digitalisasi ekonomi kerakyatan. *Management & Accounting Expose*, 5(1). <https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.633>
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The Second Wave of Digital-Era Governance: A Quasi-Paradigm for Government on the Web. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 371(1987), 20120382. <https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Nursin, E., Septiana, G., Sahidi, C., & Aimang, H. (2023). Penerapan administrasi pemerintahan desa berbasis digitalisasi 4.0. *Monsu Ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2296>
- OECD. (2019). *Digital Government Review of Brazil: Towards the Digital Transformation of the Public Sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/19939074>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Digital Government in Chile – Strengthening the Institutional and Governance Framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4dde9e1a-en>
- Pangandaheng, F., Maramis, J., Saerang, D., Dotulong, L., & Soepeno, D. (2022). Transformasi digital: sebuah tinjauan literatur pada sektor bisnis dan pemerintah. *Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Panggabean, C. and Meilani, N. (2023). Digitalisasi pelayanan publik di kota pekanbaru (studi kasus aplikasi pekanbaru dalam

- genggaman dalam tinjauan digital era governance). *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 721-728. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.622>
- Peled, A. (2019). Data Governance and Regulatory Technologies. *Journal of Information Technology & Politics*, 16(1), 87-100. <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1616096>
- Riak , Gabriel Alier., Dut Bol Ayuel Bill. (2022). The Role of *Good governance* in The Development. *IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research*, 8(11):109-110. DOI: 10.53555/sshr.v8i11.5362
- Rozikin, M., Wismanu, R., & Muttaqin, A. (2019). Model collaborative governance dalam analisis pengembangan potensi pariwisata berbasis indigenous tourism. *Media Bina Ilmiah*, 14(4), 2357. <https://doi.org/10.33758/mbi.v14i4.345>
- Sayekthi, R. (2022). Pengaruh audit internal, pengendalian internal dan implementasi good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Sosial Sains*, 2(6), 680-689. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.406>
- Sriningsih, S. and Wahyuningrum, I. (2022). Pengaruh comprehensive stakeholder pressure dan good corporate governance terhadap kualitas sustainability report. *Owner*, 6(1), 813-827. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.680>
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. New York: W. W. Norton & Company.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan *good governance* dalam penyelenggaraan sektor publik di indonesia. *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 63-72. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Tanusdjaja, H. and Ramli, I. (2018). Fenomena tanggap laba investor: studi pada sektor properti di bursa efek indonesia.. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.997>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2020). *United Nations E-government Survey 2020*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-government-Survey-2020>
- United Nations Public Administration Network. (2020). *E-government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-government-Survey-2020>
- United Nations. (2018). *E-government Survey 2018: Gearing E-government to Support Transformation Towards Sustainable and Resilient Societies*. United Nations. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-government-Survey-2018>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (2016). *Digital Dividends: World Development Report 2016*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>
- World Bank. (2021, November 28). *Deploying Blockchain and Distributed Ledger Technology for Government Digital Transformation: Overcoming Barriers to Adoption*. <https://www.worldbank.org/en/events/2021/11/28/deploying-blockchain-and-distributed-ledger-technology-for-government-digital-transformation-overcoming-barriers-to-adop>
- Yusuf. 2021. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/33196/percepatan-digitalisasi-daerah-jadikan-layanan-mudah-dan-cepat-pendapatan-daerah-meningkat/0/berita>

GLOSARIUM

D

Digitalisasi = Proses mengubah informasi dari format fisik menjadi format digital, memungkinkan informasi tersebut lebih mudah diakses, disimpan, dan dikelola melalui sistem komputer.

E

E-government: Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat.

G

Good governance = Prinsip tata kelola yang baik, meliputi akuntabilitas, transparansi, efisiensi, responsivitas, keadilan, dan inklusivitas dalam pengelolaan dan pemerintahan.

I

Integrasi Layanan Publik Digital = Penggabungan berbagai layanan publik dalam platform digital untuk memudahkan akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) = Fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk teknologi informasi dan komunikasi, termasuk hardware, software, jaringan, dan data center.

K

Kapasitas SDM = Kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi atau institusi, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi.

Kerangka Kerja = Struktur konseptual yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan strategi atau kebijakan.

M

Manajemen Perubahan = Proses, alat, dan teknik yang digunakan untuk mengelola sisi manusia dari perubahan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memaksimalkan manfaat.

Model Pendanaan = Strategi atau metode yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya finansial untuk mendukung proyek atau inisiatif.

S

Stakeholder Engagement = Keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan atau dalam proyek tertentu.

INDEKS

A

akuntabilitas · 2, 5, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 44, 45, 47, 53, 60, 67, 71, 80, 91, 92, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 117

D

digitalisasi · iii, iv, v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 126

E

e-government · 7, 46, 47, 48

ekonomi · 1, 10, 11, 12, 19, 26, 35, 53, 80, 87, 88, 89, 94, 98, 105, 106, 109, 114

evaluasi · 4, 6, 13, 14, 22, 29, 30, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 56, 60, 62, 64, 67, 72, 73, 79, 90, 91, 92, 94, 98

G

governance · iii, iv, vii, 2, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 26, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 80, 82, 90, 114, 115, 126

government · 46, 48, 113, 116

I

implementasi · iv, vii, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57, 58, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 79, 84, 86, 88, 89, 90, 94, 96, 98, 102, 105, 106, 107, 115, 126

informasi · vii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 96, 102, 106, 107, 108, 117, 126

infrastruktur · iii, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 43, 48, 49, 50,
52, 53, 57, 58, 59, 60, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 86, 87, 88, 89, 93, 95, 97, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 126
integrasi · v, 2, 5, 13, 24, 25, 26, 30, 39, 40, 52, 77, 78, 107, 126

K

kebijakan · v, vii, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 37, 38,
40, 42, 47, 53, 54, 56, 69, 78, 80, 81, 84, 89, 91, 92, 96, 104, 105, 109, 117
kepemimpinan · 3, 16, 27, 30, 60, 61, 62, 71, 75, 76, 77, 78
kinerja · 1, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 28, 29, 34, 38, 43, 44, 45, 62, 63, 91, 92, 98, 112

M

manajemen · v, vii, 14, 17, 23, 48, 51, 53, 55, 56, 65, 67, 68, 69, 73, 75, 79, 81, 83, 84, 93,
96, 106, 111
monitoring · 43, 44, 67, 72, 84

O

organisasi · iv, 1, 3, 10, 13, 16, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 36, 39, 42, 43, 52, 56, 57, 60, 61, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 87, 93, 96, 108, 114, 117

P

partisipasi · 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 36,
39, 40, 41, 47, 48, 49, 54, 59, 64, 65, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 83, 91, 92, 95, 96, 97, 109,
118
pelayanan · iii, iv, v, vii, viii, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 37, 38, 40, 42, 49, 51,
61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 95, 102, 104, 109,
114, 117, 126
pemerintah · iv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 114, 117, 126
pengelolaan · 5, 7, 10, 11, 12, 13, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 48, 49, 53, 55, 59, 80, 81,
84, 89, 92, 106, 110, 117, 126
perencanaan · iv, 7, 13, 15, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 54, 58, 60, 64, 67, 73, 79, 80,
81, 84, 85, 88, 96, 126

publik · iii, v, vii, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 126

R

regulasi · iv, 2, 5, 9, 13, 25, 26, 27, 29, 67, 68, 69, 70, 71, 89, 93, 96, 97, 98, 102, 104, 105, 107, 126

S

stakeholder · 28, 45, 65, 66, 69, 73, 79, 80, 115

T

teknologi · iii, iv, v, vii, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 117, 126

transparansi · 2, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 60, 63, 64, 67, 70, 71, 77, 80, 81, 83, 91, 92, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 117

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Drs. H. M. Harry Mulya Zein, M.Si.

Penulis lahir di Pandeglang pada tanggal 19 Juli 1960. Ia memulai perjalanan pendidikannya di Pandeglang, dari SD hingga SMA. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia untuk program studi Administrasi Negara (S1) dan Ilmu Administrasi (S2). Harry kemudian meraih gelar doktoral di bidang Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran.

Sepanjang kariernya, Dr. Harry Mulya Zein telah menduduki berbagai posisi penting. Di awal kariernya, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada tahun 1994, lalu meraih posisi sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya pada tahun 1996. Beliau terus menanjak dengan menjadi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun 1997, Camat Cipondoh pada tahun 1998, dan Asisten Administrasi Pemerintahan-SETDA pada tahun 2001. Tidak berhenti di situ, Dr. Harry juga pernah menjabat sebagai Asisten Pengendalian Pembangunan-SETDA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2002, Sekda Kota Tangerang pada tahun 2004, Kepala Sekretariat KASN pada tahun 2015, dan Asisten Komisioner pada tahun 2019. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di IPDN sejak tahun 2015.

Dalam dunia penulisan, Dr. Harry Mulya Zein telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan buku. Beberapa judul yang menonjol di antaranya adalah "Ziarah Budaya Kota Tangerang: Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah", "Kultur Birokrasi Menebar Kepentingan Warga", "Transformasi Birokrasi, dan "Reformasi Birokrasi: Belajar dari Daerah". Selain itu, beliau juga banyak berkarya dengan menulis artikel ilmiah di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Dr. Harry Mulya Zein tampil sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Karyanya mencerminkan pemikiran mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan negeri.



Sisca Septiani, S.Pd., M.Pd.

Penulis lahir di Purwakarta, memulai pendidikan dari TK sampai SMA di Kabupaten Purwakarta, selanjutnya mengenyam Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan Bandung. Penulis kemudian melanjutkan S2 pada Prodi Administrasi Pendidikan dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Makro di Universitas Islam Nusantara Bandung. Penulis sekarang berstatus sebagai mahasiswa S3 pada Prodi Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang.

Penulis memulai terjun dalam dunia Pendidikan dengan menjadi guru di Sekolah Menengah Pertama dari tahun 2010 di SMPN 3 Purwakarta sampai dengan tahun 2019. Mulai tahun 2015 sampai dengan saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di PTS di STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta. Penulis aktif pada penulisan buku, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Beberapa karya berupa artikel yang publish di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis aktif di beberapa organisasi seperti Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. Penulis juga aktif sebagai editorial team dan reviewer pada tiga jurnal nasional.

DIGITALISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Katalis Untuk Integrasi dan Optimalisasi Good Governance

Buku ini membahas secara komprehensif perjalanan transformasi digital di sektor pemerintahan daerah dan bagaimana proses ini menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menguraikan konteks digitalisasi dalam pemerintahan, evolusi pelayanan publik di era digital, dan peran teknologi informasi, buku ini menawarkan pandangan mendalam tentang cara-cara inovatif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital. Lebih lanjut, buku ini menggali prinsip-prinsip dasar digitalisasi dan *good governance*, mengemukakan model integrasi layanan publik digital, dan mengeksplorasi kerangka kerja regulasi yang mendukung. Strategi implementasi digitalisasi, termasuk perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur, kapasitas SDM, dan pengelolaan data, dibahas untuk memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital. Melalui studi kasus dan analisis komparatif, buku ini juga menawarkan wawasan tentang *best practice* dan pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan. Dengan langkah-langkah ke depan dan prediksi tren masa depan, buku ini bertujuan untuk menginspirasi pemerintah daerah agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam melayani kebutuhan masyarakat di era digital.